



KEBIJAKAN PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) BITUNG SEBAGAI KAWASAN INTI MINAPOLITAN ¹

A POLICY ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF BITUNG OCEAN FISHING PORT AS MINAPOLITAN CORE REGION IN BITUNG CITY

Radityo Pramoda, Armen Zulham, dan Yesi Dewita Sari

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. KS. Tubun Petamburan VI, Jakarta – 10260
Email : radityopramoda@yahoo.com

Abstract

This study aims to identify whether Ministry of Marine Affairs and Fisheries policy is in accordance with the determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region in Bitung City. Analysis of the research was carried out by utilizing descriptive case study and survey methods. Primary and secondary data were collected through interviews, mail survey (closed questions), field observations, and literature study. Results of the research indicate that: 1) aspects of development pillars in Bitung Ocean Fishing Port have been able to support the development of Bitung City to become Minapolitan area 2) impact of Minapolitan policy can create local industrial throughout Bitung Ocean Fishing Port, 3) determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan core region of Ocean Fishery Port Minapolitan Bitung comes to be a strategic policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Keywords: Policy, Bitung Ocean Fishing Port, Core Region, Minapolitan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah kebijakan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sudah sesuai dengan menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode *survey*, serta dipaparkan secara deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, *mail survey* (daftar pertanyaan tertutup), observasi lapangan, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan: 1) aspek pilar pembangunan pada kawasan

¹ Naskah diterima pada 22 Oktober 2012, revisi pertama pada 9 Januari 2013, revisi kedua pada 22 Maret 2013, revisi ketiga pada 27 Maret 2013, disetujui terbit pada 27 Maret 2013



Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung telah mendukung pengembangan Kota Bitung sebagai wilayah Minapolitan; 2) dampak kebijakan Minapolitan dapat menciptakan kegiatan perekonomian lokal yang berbasis industri pada kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung; 3) penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan merupakan kebijakan strategis pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang tepat.

Kata kunci: Kebijakan, PPS Bitung, Kawasan inti, Minapolitan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah/Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2010, mengeluarkan kebijakan pengembangan kegiatan terpadu berbasis kawasan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010, tentang Minapolitan (Permen KP No. PER.12/MEN/2010). Terminologi Minapolitan menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2010), yaitu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan (KP) berbasis kawasan berdasarkan prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Menurut Permen KP No. PER.12/MEN/2010, kawasan Minapolitan mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri: sentra produksi; pengolahan; pemasaran komoditas perikanan; pelayanan jasa; dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan Minapolitan dibutuhkan untuk merevitalisasi perikanan serta membangun ekonomi KP secara holistik, yang merujuk kepada eksistensi kegiatan hulu hingga hilir (produksi, pengolahan, pemasaran, jasa, dan/atau kegiatan lain).

Langkah strategis pendukung kebijakan pengembangan kegiatan

terpadu berbasis kawasan, dijumpai dengan menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan Minapolitan. Dasar hukum penetapan kawasan Minapolitan adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010, tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Kepmen No. KEP.32/MEN/2010). Kebijakan Minapolitan memberikan pemahaman mengenai pentingnya integrasi kegiatan KP dalam suatu sistem usaha mina bisnis. Menurut Mustafa *et al.* (2011), kebijakan penetapan wilayah Minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan di daerah yang memiliki potensi KP unggulan. Menurut Kepmen No. KEP.32/MEN/2010, Kota Bitung (Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung) sebagai kawasan inti) merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah Minapolitan.

Penetapan PPS Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan menuntut pihak pengelola pelabuhan untuk memenuhi syarat kesiapan, yang mengacu kepada indikator pilar pembangunan Minapolitan. Indikator pilar pembangunan Minapolitan menurut Zulham dan Purnomo (2010), adalah: memperkuat kelembagaan; pemberdayaan masyarakat dan bisnis;



rasionalisasi pemanfaatan sumber daya dan tata ruang; integritas kebijakan dan tata kelola pemerintahan; pembangunan infrastruktur; serta pemanfaatan teknologi. Menurut Harian Waspada Medan (2012), pembangunan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan dalam kerangka *economic of scale* dan *economic of scope*, diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan industrialisasi perikanan. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah (KKP) sudah sesuai dengan menetapkan PPS Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian kebijakan penetapan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan, dilaksanakan melalui pendekatan studi kasus dan metode *survey*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan pelabuhan. Data primer yang digali meliputi: produksi perikanan; tenaga kerja; pendapatan dan pengeluaran; serta industri pendukung yang berkembang, sedangkan data sekunder yang diidentifikasi mencakup: laporan tahunan; hasil penelitian; dan/atau kajian tentang pengelolaan sumber daya perikanan di PPS Bitung. Variabel yang menjadi data penelitian, dijadikan dasar untuk membahas kondisi pengelolaan PPS Bitung pada kerangka pilar pembangunan Minapolitan. Kajian terhadap pilar pembangunan Minapolitan, dilakukan untuk mengetahui kesiapan PPS Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung.

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011, di kawasan PPS Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kota Bitung merupakan salah satu lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah pendukung program Minapolitan berbasis perikanan tangkap. Kota Bitung berada dalam wilayah pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian masyarakat. Kota Bitung sebagai wilayah Minapolitan, telah menetapkan PPS Bitung menjadi kawasan inti untuk mendukung pembangunan perikanan secara menyeluruh. PPS Bitung dijadikan sebagai lokasi penelitian karena: (a) posisinya yang strategis; (b) kegiatan industri pada sektor perikanan sudah tumbuh dan berkembang; (c) memiliki sumber daya potensial; (d) didukung oleh kondisi alam yang baik.

PPS Bitung berada pada koordinat geografi 0°26'55" Lintang Utara dan 125°12'20" Bujur Timur (berseberangan dengan Pulau Lembeh). Kondisi geografis tersebut menyebabkan lokasi pelabuhan menjadi terlindungi terhadap pengaruh ombak dan angin. Letak PPS Bitung, juga telah menjadikan posisi pelabuhan berhadapan langsung dengan daerah tangkapan (*fishing ground*) yang potensial di ZEEI Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan sekitarnya. PPS Bitung ditinjau berdasarkan aspek topografi, mempunyai karakteristik wilayah yang berbukit (45,06%), bergunung (32,73%), daratan landai (4,18%), dan berombak (18,03%). Lokasi PPS Bitung bagian timur dimulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan Tanjung Merah,



sedangkan wilayah baratnya merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan $0^{\circ} - 150^{\circ}$ (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2010).

Metode Analisis Data

Responden dalam penelitian ini adalah : Kepala PPS Bitung; aparat pemerintah daerah; nelayan; tokoh masyarakat; serta pelaku usaha perikanan. Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan teknik studi literatur, wawancara mendalam, *mail survey* (daftar pertanyaan tertutup), dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memahami dan memotret kesiapan pilar pembangunan Minapolitan kawasan PPS Bitung secara komprehensif. Data yang diperoleh berkaitan dengan kondisi fisik wilayah, sosial ekonomi masyarakat, potensi, dan masalah pengembangan kawasan Minapolitan. Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran kesiapan pengelolaan PPS Bitung dalam mendukung program Minapolitan. Kesiapan pengelolaan ini dijadikan parameter untuk mengetahui, bahwa kebijakan pemerintah (KKP) menetapkan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan Kota Bitung sudah tepat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Minapolitan

Kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan (Kamus Pusat Bahasa, 2008). Kebijakan sebagai keputusan yang mengikat publik harus

dibuat oleh otoritas politik, yakni penerima mandat dari publik/rakyat. Kebijakan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh administrasi negara dan dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan publik merupakan keputusan mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan yang bersifat publik pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Menurut Suharto (2008), mewujudkan suatu kebijakan perlu memperhatikan: (a) adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, agar dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; (b) harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; (c) adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apabila suatu kebijakan dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Tindakan yang diambil pemerintah (KKP) guna mensejahterakan masyarakat KP, adalah menetapkan kebijakan Minapolitan melalui Permen KP No. PER.12/MEN/2010. Lahirnya kebijakan Minapolitan merupakan salah satu realisasi revolusi biru yang dicanangkan KKP pada tahun 2010, sebagai *grand strategy* dalam rangka menjadikan Indonesia negara penghasil produk perikanan terbesar di dunia tahun 2015 (Anonymous, 2010).

Revolusi biru adalah revolusi *mindset* suatu perubahan orientasi dalam melihat serta menyikapi *economic opportunity*, yang sebelumnya melalui pendekatan darat (kontinental) dan sekarang menjadi pendekatan kelautan (samudera).



Kebijakan Minapolitan merupakan program perikanan yang berupaya mensinergikan produksi bahan baku, pengolahan, dan pemasaran, dalam satu wadah kegiatan besar pada wilayah/kawasan berbasis komoditi perikanan unggulan. Perencanaan pengembangan kebijakan Minapolitan membutuhkan adanya proses sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh *stakeholders*. Hal ini dilakukan guna menyamakan persepsi, mendapatkan masukan bagi proses pembangunan, serta menyikapi persaingan pasar (domestik dan global). Penetapan kawasan pengembangan Minapolitan pada suatu daerah, dilaksanakan melalui studi kelayakan yang cermat (meliputi aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan) (Sari *et al.*, 2011).

Strategi pengembangan kawasan Minapolitan meliputi: (1) pembangunan sistem dan usaha yang berorientasi pada kekuatan pasar untuk menembus batas kawasan; (2) pembangunan sarana dan prasarana publik untuk memperlancar distribusi hasil perikanan dengan efisiensi serta resiko minimal; (3) penataan regulasi untuk menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian daerah yang kondusif. Kebijakan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan (Madani, 2011). Pengembangan wilayah Minapolitan, dilaksanakan menurut arah kebijakan nasional dan menjadi dasar pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar secara adil. Pengembangan wilayah diarahkan pada perekonomian daerah yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi dan keunggulan

kompetitif (berdasarkan produk perikanan unggulan yang dimiliki).

Gambaran Lokasi

Batas wilayah sebelah selatan Kota Bitung: Laut Maluku; utara: Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe; timur: Laut Maluku dan Samudera Pasifik; barat: berbatasan dengan Kecamatan Kauditan (Pemerintah Kota Bitung, 2010). Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bitung (2010), wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 304 km² dan secara administratif terbagi dalam delapan wilayah kecamatan, serta 69 kelurahan. Penduduk Kota Bitung berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2010, berjumlah 187.932 jiwa (96.167 laki-laki dan 91.765 perempuan). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bitung tahun 2009, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 (Badan Pusat Statistik Kota Bitung, 2010). Nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 3.46 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sebesar 3.09 triliun rupiah.

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2009 mengalami peningkatan dengan total nilai 2.04 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2008 (1.9 triliun rupiah). Bitung merupakan kota satelit yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Sulawesi Utara. Kota Bitung menjadi daerah penghasil ikan dengan kontribusi yang cukup besar untuk pemasaran daerah sekitarnya, maupun ekspor ke luar negeri (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik, 2010). Pembangunan pelabuhan perikanan pada hakekatnya dilakukan guna mendukung kemajuan Kota Bitung.



Legalitas keberadaan PPS Bitung ditetapkan oleh Peraturan Menteri KP Nomor: PER.19/MEN/2008, pada tanggal 6 Oktober 2008. Luas lahan yang dimiliki PPS Bitung adalah 23.418 m² (sertifikat HPL No. 1/1996 a/n Direktorat Jenderal Perikanan). PPS Bitung terletak di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, dan dibangun tanggal 18 Juli 2001 (beroperasi pada tanggal 10 September 2004).

Pilar Pembangunan Minapolitan PPS Bitung

Minapolitan secara konseptual memiliki unsur: (a) pembangunan sektor KP berbasis wilayah; (b) kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk KP. Minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan di daerah potensial unggulan (Mustafa *et al.*, 2011). Kesiapan PPS Bitung menjadi kawasan inti daerah potensi unggulan, dapat diketahui melalui pilar yang menjadi tolak ukur pembangunan kawasan Minapolitan. Data yang terkait dengan pilar pembangunan Minapolitan PPS Bitung, didasarkan atas hasil jawaban daftar pertanyaan tertutup (*mail survey*) yang dikirimkan kepada pengelola pelabuhan.

Memperkuat Kelembagaan

Menurut Mustafa *et al.* (2011), dalam suatu masyarakat apapun dan dimanapun akan selalu ditemukan beragam kelembagaan yang dapat dijadikan sarana, serta media pemberdayaan komunitas guna mendukung pengembangan kawasan Minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa untuk mengembangkan kawasan inti

Minapolitan dibutuhkan kelembagaan usaha kuat, yang mampu mengintegrasikan kegiatan sektoral dengan kegiatan yang diprakarsai oleh daerah. Dukungan pemerintah daerah terhadap PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan sudah diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi, SK operasional pelaksana, alokasi anggaran, dan perencanaan pengembangan pembangunan fisik. Persepsi pejabat pemerintah daerah terhadap kebijakan Minapolitan, menyatakan bahwa program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh dinas perikanan daerah. Dukungan yang diberikan oleh DPRD terhadap PPS Bitung, telah diaplikasikan dalam bentuk program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh dinas perikanan.

Kelembagaan yang sudah ada dan berfungsi sebagai pendukung program Minapolitan adalah: koperasi nelayan; lembaga yang mengendalikan konflik nelayan (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia serta lembaga adat); dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya. Asosiasi kelompok pedagang juga telah dibentuk, akan tetapi hanya aktif pada saat ada kegiatan saja. Bentuk kelembagaan dalam mengelola sumber daya perikanan dan mengantisipasi kenaikan hasil tangkapan nelayan, belum ada perencanaan untuk dikembangkan oleh pihak manajemen PPS Bitung. Penguatan kelembagaan usaha yang ada di kawasan PPS Bitung, dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha kelompok. Penguatan kelembagaan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan: aktivitas organisasi kelompok; kemampuan memupuk modal;



kemampuan kelompok memilih bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan; serta jaringan kerjasama dengan pihak lain.

Pemberdayaan Masyarakat dan Bisnis

Pemberdayaan masyarakat dan bisnis merupakan upaya peningkatan kemampuan untuk dapat mandiri, serta mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pemberdayaan adalah proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara teratur dalam meningkatkan partisipasi dan kemampuan. Pemberdayaan masyarakat dapat dibangun dengan cara: menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan masyarakat berkembang, serta memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Masyarakat yang berdomisili di kawasan PPS Bitung pada tingkat kecamatan, mempunyai perbandingan yang sama antara penduduk lokal (50%) dan pendatang (50%) (komposisi penduduk lebih banyak perempuan). Penduduk yang berperan sebagai nelayan serta pengusaha pengolah hasil perikanan adalah pendatang dan lokal, sedangkan komposisi penduduk yang berperan memasarkan ikan didominasi oleh kaum perempuan.

Penduduk yang menjadi tenaga kerja sebagai buruh pada kawasan PPS Bitung, sebagian berasal dari Kota Bitung dan sebagian lagi berasal dari luar daerah. Penyedia jasa transportasi distribusi hasil tangkapan dan penyedia jasa logistik untuk kapal/perahu penangkap ikan, yang lebih berperan adalah pengusaha lokal. Penduduk yang berperan menyediakan jasa pelayanan administrasi keberangkatan

serta jasa perbaikan kapal/perahu penangkapan ikan, adalah pengusaha lokal dan pendatang. Kelompok penduduk yang berperan menyediakan jasa permodalan, yaitu pedagang (komposisi penduduk penyedia jasa permodalan seimbang antara penduduk lokal dan pendatang). Warung makan dan pedagang ikan keliling, merupakan usaha ekonomi yang berkembang pada kawasan Minapolitan PPS Bitung.

Rasionalisasi Pemanfaatan Sumber Daya dan Tata Ruang

Sumber daya ikan yang dimiliki oleh Kota Bitung mempunyai potensi yang besar untuk dikelola dan dimanfaatkan. Komoditas Tuna dan Cakalang merupakan kelompok ikan pelagis besar yang pada umumnya didaratkan di PPS Bitung, sedangkan ikan pelagis kecil yang mendominasi adalah Layang dan Tongkol. Jenis ikan dasar yang paling banyak didaratkan adalah Gurita dan ikan karang yang sering ditangkap oleh nelayan, yaitu jenis Kakap atau Kerapu. Aturan lokal yang belum ada pengaturannya adalah: aktivitas menangkap ikan (waktu, jenis alat, serta lokasi penangkapan); ukuran ikan yang boleh didaratkan; penalti pelanggaran penangkapan ikan; dan penjualan hasil tangkapan. Dokumen tentang tata ruang dalam pelabuhan perikanan, pengembangan kawasan pelabuhan perikanan, serta pengembangan kawasan bisnis dan industri perikanan sudah ada, tetapi belum menjadi dokumen resmi. Data tentang potensi ikan dan lokasi penangkapan ikan yang dimiliki, diperoleh melalui hasil penelitian. Rasionalisasi pemanfaatan sumber daya dan tata ruang, menjadi penting sebagai informasi untuk pengambilan



keputusan serta perencanaan pengaturan wilayah PPS Bitung.

Integritas Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan

Thomas R. Dye *dalam* Islamy (2002), mengemukakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijaksanaannya (harus meliputi semua tindakan pemerintah). Pada konteks ini posisi pemerintah bukan sekedar mengutarakan keinginannya saja, tetapi harus mengimplementasikan secara benar kebijakan yang telah dikeluarkan. Menurut Subarsono (2011), suatu kebijakan yang telah ditetapkan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil diimplementasikan. Pelaksanaan kebijakan Minapolitan di PPS Bitung menuntut adanya kesiapan struktural dan administrasi. Pembangunan PPS Bitung merupakan akumulasi berbagai kebijaksanaan seperti: publik; teknis; alokasi sumber daya; personalia; keuangan; dan pelayanan masyarakat KP.

Kebijaksanaan merupakan ketentuan pejabat yang berwenang dan dijadikan acuan ataupun petunjuk dalam setiap kegiatan, guna mencapai tujuan organisasi (Sitanggang *et al.*, 2011). Mengacu kepada hal tersebut, untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang mungkin timbul dengan ditetapkannya PPS Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan, maka diperlukan dukungan pemerintah daerah setempat. Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan pelabuhan, diaplikasikan dengan membuat kebijakan penetapan PPS Bitung sebagai pusat pendaratan ikan. Pihak

manajemen pelabuhan sendiri, juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai penjualan ikan dan pengelolaan limbah hasil perikanan. Kebijakan lainnya yang telah ada pengaturannya, adalah tentang keselamatan nelayan akibat cuaca ekstrim dan larangan menangkap ikan pada saat cuaca ekstrim.

Pembangunan Infrastruktur

Kawasan PPS Bitung telah dilengkapi dengan fasilitas pokok, fungsional, maupun pendukung, untuk menunjang kelancaran operasional pelabuhan. Fasilitas yang dimiliki oleh PPS Bitung, dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa infrastruktur yang berkaitan dengan jalan menuju ke PPS Bitung kondisi aspalnya masih baik (dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat). Kawasan PPS Bitung memiliki dua dermaga (masih berfungsi), dengan ukuran panjang kurang lebih 100 – 150 m dan kedalaman kolam dermaga < 3 m. Daya dukung kedua dermaga tersebut tidak dapat menampung seluruh kapal/perahu penangkap ikan, sedangkan daya dukung kolam labuh hanya dapat menampung < 100 unit kapal/perahu penangkap ikan. Kondisi kolam labuh PPS Bitung tidak mengalami pendangkalan dan dapat menampung kapal/perahu penangkap ikan (ukuran dominan kapal 3 – 10 *Gross Tonnage* (GT)). Sarana air yang tersedia di PPS Bitung bersumber dari sumur bor (air tanah), sedangkan air untuk kebersihan dan perbekalan kapal/perahu penangkap ikan diperoleh melalui mobil tangki air.

Bangunan TPI pada kawasan PPS Bitung kondisinya masih baik dan



berfungsi (dikelola oleh UPT pemerintah daerah). Tenaga kerja pembongkaran ikan jika ada kapal/perahu yang berlabuh, dilakukan oleh kelompok buruh. Hasil tangkapan ikan yang didaratkan, pada umumnya berasal dari nelayan lokal dan nelayan bebas. Pabrik es yang berada di luar kawasan PPS Bitung mempunyai kapasitas produksi lebih dari 1000 balok per hari (kondisinya baik). Pasokan listrik yang dibutuhkan untuk operasional pelabuhan, daya

dukungnya dirasakan kurang. Doking kapal yang terletak pada kawasan PPS Bitung masih dalam kondisi baik dan berfungsi, demikian juga halnya dengan dua fasilitas pengisian BBM (stok setiap bulan: 500 – 1000 kilo liter). Lokasi penjual sarana produksi, dua *cold storage* milik swasta (kapasitas penyimpanan 25 – 60 ton), serta bangunan pasar tempat penjualan ikan hasil tangkapan (kondisinya belum tertata baik), terletak di luar kawasan PPS Bitung.

Tabel 1. Fasilitas PPS Bitung

| Fasilitas | Infrastruktur | Keterangan |
|---------------------|--|---|
| Pokok | Dermaga I (<i>stair landing wharf</i>) | Ukuran: P= 126 m x L= 14 m Bobot kapal 30 – 600 ton Kedalaman < 5 m LWS |
| | Dermaga II (<i>carrier wharf</i>) | Ukuran: P= 115 m x L= 14 m Bobot kapal 5 – 30 ton Kedalaman < 1.5 m LWS |
| | Jalan kompleks | - Jalan utama (1.648 m ²) - Jalan kios (433 m ²) - Jalan <i>mess operator</i> (429 m ²) - Jalan industri (802.5 m ²), perkerasan <i>asphalt hot mix</i> dan sebagian aspal penetrasi |
| | Lahan/areal pelabuhan | Luas total 4.6 hektar (reklamasi 1 hektar) |
| Fungsional | Gapura | 440 m ² |
| | Kantor PPS Bitung | 605 m ² |
| | Tempat pelelangan ikan | 1.242 m ² |
| | MCK umum | 50 m ² |
| | Pos jaga | 12 m ² |
| | Kantor pengawasan | 195 m ² |
| | Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Bitung | 406.25 m ² |
| | Drainase | 490 m ² |
| | Penampungan air bersih | 40 m ² |
| Pagar keliling | 299.71 m ² | |
| Penunjang | Rumah dinas pimpinan | 150 m ² |
| | <i>Mess operator</i> | 108 m ² |
| | Mushola | 135.52 m ² |
| | Gereja | 800 m ² |
| | Taman pelabuhan | 1.424,38 m ² |
| | IPAL | 100 m ² |
| | Kapasitas tanki BBM | 100 kilo liter |
| | Kios pesisir: | |
| | - Tahap I (12 unit) | 24.90 m ² |
| | - Tahap I (3 unit) | 30.71 m ² |
| | - Tahap II (8 unit) | 26.25 m ² |
| | - Tahap II (1 unit) | 28.69 m ² |
| | Pos kesehatan masyarakat | 63 m ² |
| MCK | 45 m ² | |
| Gedung laboratorium | 603 m ² | |

Sumber: Sitanggang *et al.* (2011)



Pemanfaatan Teknologi

Alat penangkap ikan yang berkembang pada kawasan PPS Bitung diintroduksi oleh pemerintah. Kapal/perahu yang digunakan oleh nelayan, teknologinya mengadopsi dari luar daerah. Teknologi yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan, operasionalisasinya sudah menggunakan alat pencari ikan. Penanganan ikan di kapal dilakukan dengan memasukan hasil tangkapan ke dalam palka yang diberi es curah,

sedangkan penanganan setelah sampai di pelabuhan disimpan pada wadah yang diisi es curah. Praktek penanganan ikan (di kapal maupun pelabuhan) masih dilakukan secara manual. Transportasi ikan dari pelabuhan menuju pasar dibawa menggunakan wadah yang diberi es (teknologinya diintroduksi oleh pemerintah). Jenis alat tangkap utama dan jenis ikan yang ada di kawasan PPS Bitung, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Alat Tangkap Utama dan Jenis Ikan

| Jenis Ikan Dominan | Satuan | Alat Tangkap Utama di PPS Bitung | | | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|---------------|---------|------------------------|------------|-------|
| | | <i>Purse Seine</i> | <i>Gilnet</i> | Pancing | <i>Pole & Line</i> | Rawai Tuna | Bagan |
| Tuna | % | - | - | 65 | - | 35 | - |
| Cakalang | % | 54.84 | 1.02 | - | 44.10 | - | - |
| Tongkol | % | 100 | - | - | - | - | - |
| Baby Tuna | % | 75 | - | - | 25 | - | - |
| Tenggiri | % | - | 100 | - | - | - | - |
| Selar | % | 100 | - | - | - | - | - |
| Bawal | % | - | 100 | - | - | - | - |
| Kerapu | % | - | 100 | - | - | - | - |
| Kembung | % | 100 | - | - | - | - | - |
| Layang | % | 100 | - | - | - | - | - |
| Cumi | % | - | - | 25 | - | - | 75 |
| Hiu | % | - | - | 100 | - | - | - |
| Cucut | % | - | - | 100 | - | - | - |
| Teri | % | - | - | - | - | - | 100 |
| Lemuru | % | 100 | - | - | - | - | - |

Sumber: Data primer (diolah), 2011

Prakiraan Dampak Kebijakan Penetapan PPS Bitung sebagai Kawasan Inti Minapolitan

Menurut Subarsono (2011), *outcome* suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan atau *target group*, agar kebijakan tersebut terasa manfaatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya, yang disebabkan oleh kebijakan publik yang tidak

sesuai dengan penerima kebijakan. Penetapan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan memberikan implikasi terhadap: pendapatan dan pengeluaran, kependudukan dan tenaga kerja, ketersediaan sumber daya, serta pemasaran hasil dan potensi pasar.

Pendapatan dan Pengeluaran

Fokus utama kebijakan adalah pelayanan publik, yang merupakan



segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup (Fermana, 2009). Aktivitas penangkapan ikan di PPS Bitung dilakukan sepanjang tahun, yang terbagi ke dalam musim puncak, sedang, dan paceklik. Musim puncak penangkapan ikan di PPS Bitung dimulai pada bulan Juli – Oktober dan selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Desember. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap tingkat penghasilan yang diterima oleh nelayan. Dampak iklim cuaca telah

membuat hasil tangkapan ikan nelayan tidak dapat diprediksi nilainya, turunnya pendapatan, dan tidak diketahuinya lagi kepastian bulan pada ketiga musim.

Tingkat penghasilan atau pendapatan (Tabel 3) yang diterima masyarakat KP (nelayan, pedagang, dan pengolah) setiap bulannya di PPS Bitung, menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan penghasilan ini disebabkan oleh cuaca buruk, yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut untuk menangkap ikan.

Tabel 3. Pendapatan Bulanan Masyarakat KP

| Penghasilan Nelayan, Pedagang, dan Pengolah di PPS Bitung | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| | Puncak | Sedang | Paceklik |
| Nelayan | 10.500.000 | 5.500.000 | 2.750.000 |
| Pedagang | 6.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Pengolah | 3.000.000 | 1.900.000 | 970.000 |

Sumber: Data primer (diolah), 2011

Tabel 3, menunjukkan bahwa penurunan penghasilan bulanan pada musim sedang dan musim paceklik, dikarenakan berkurangnya jumlah trip nelayan menangkap ikan. Situasi tersebut mengakibatkan hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan menjadi berkurang, serta mempengaruhi pendapatan pedagang dan pengolah. Tindakan antisipasi untuk menghadapi penurunan penghasilan pada musim paceklik dapat dilakukan dengan: (a) mencari pekerjaan sampingan; (b) memberdayakan dan memperkuat kelembagaan pedagang serta koperasi, agar masyarakat KP mampu membentuk usaha baru yang dapat

mengangkat perekonomiannya; (c) pelatihan berdasarkan potensi yang dimiliki, untuk meningkatkan kapabilitas pengolah dan pedagang. Hal ini bertujuan agar usaha yang dimiliki dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima masyarakat KP Kota Bitung.

Penerimaan pendapatan, berhubungan erat dengan pengeluaran bulanan yang menjadi faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Pengeluaran bulanan rumah tangga masyarakat KP (Tabel 4), meliputi konsumsi (pangan dan non pangan) dan bukan konsumsi (pendidikan, rekreasi, dan lain-lain).



Tabel 4. Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga (Konsumsi dan Non Konsumsi)

| Pengeluaran Masyarakat KP di PPS Bitung | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| | Puncak | Sedang | Paceklik |
| Nelayan | 700.000 | 500.000 | 320.000 |
| Pedagang | 400.000 | 312.000 | 297.000 |
| Pengolah | 395.000 | 287.000 | 250.000 |

Sumber: Data primer (diolah), 2011

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa pengeluaran masyarakat KP di kawasan PPS Bitung, lebih besar pada saat musim puncak. Faktor penyebabnya adalah kebutuhan yang kurang atau belum terpenuhi pada musim sedang dan musim paceklik, akan dipenuhi pada saat musim puncak.

Pendapatan dan pengeluaran nelayan, pedagang, serta pengolah, di kawasan PPS Bitung pada musim puncak hingga musim paceklik, mempunyai tren yang menurun. Fenomena ini menunjukkan, bahwa pola gaya hidup (terhadap pengeluaran dan pendapatan) mereka selalu sama pada ketiga musim tersebut. Pola ini pada kenyataannya tidak berpengaruh signifikan terhadap total penghasilan yang diterima pada ketiga musim tersebut. Pendapatan yang diterima dapat digolongkan cukup bagus dan masih berpeluang untuk lebih ditingkatkan dengan adanya kebijakan Minapolitan.

Kependudukan dan Tenaga Kerja

Perkembangan Kota Bitung telah memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan jumlah penduduk. Angka kelahiran di Kota Bitung pada tahun 2009 berjumlah 3.675 jiwa dan jumlah kematian 433 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Bitung per tahun (selama 10 tahun terakhir) sebesar

2.99%. Penduduk Kota Bitung secara demografis tergolong mempunyai struktur umur muda (pola ini masih akan terus berlangsung pada waktu mendatang). Struktur ini membawa implikasi munculnya masalah yang menyangkut ketenagakerjaan, seperti pengangguran dan penurunan kualitas sumber daya manusia (jumlah pencari kerja di Kota Bitung tahun 2009: 10.688 orang).

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pada kegiatan pembangunan perekonomian (dalam kaitannya dengan upaya pemerintah mengatasi masalah kemiskinan), adalah ketenagakerjaan. Keragaman latar belakang serta tingkat pendidikan, merupakan faktor penentu dalam percepatan alih teknologi dan produktivitas. Program Minapolitan diharapkan membawa dampak nyata terhadap tenaga kerja Kota Bitung. Kondisi tersebut bisa dicapai dengan membuat kebijakan untuk menggerakkan usaha pada sektor KP (khususnya skala menengah ke bawah). Menjadikan tenaga kerja sebagai makna *human capital*, dapat menyebabkan tumbuhnya ekonomi Kota Bitung yang menjanjikan.

Ketersediaan Sumber Daya

Kota Bitung adalah salah satu kota di Sulawesi Utara, yang memiliki nilai produksi perikanan terbesar



(Tabel 5). Hal ini terkait dengan kepemilikan lautan yang cukup luas, serta ketersediaan sarana yang dimiliki PPS Bitung dalam menunjang pengembangan sumber daya perikanan. Tingkat produksi dan nilai produksi perikanan Kota Bitung, didasarkan pada potensi sumber daya perikanan laut dan darat. Jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2009 sebesar 144.953,2 ton, dengan nilai produksi sebesar 932,24 milyar rupiah. Nilai produksi perikanan laut meningkat sebesar 850,49 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2008 (Pemerintah Kota Bitung, 2010). Kenaikan produksi perikanan laut tersebut tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah kapal ikan (Tabel 6). Peningkatan nilai produksi yang terjadi, lebih dikarenakan adanya diseminasi teknologi penangkapan ikan.

Peningkatan produksi dan nilai produksi, juga dialami pada sumber daya perikanan darat (tambak, kolam,

dan sawah) yang dimiliki Kota Bitung. Menurut Pemerintah Kota Bitung (2010), produksi perikanan darat pada tahun 2009 mengalami peningkatan 0,05% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi perikanan darat (76,2 ton) diikuti dengan peningkatan nilai produksi sebesar 771,20 milyar rupiah (nilai produksi tahun 2008: 713,6 milyar rupiah). Pengembangan program Minapolitan Kota Bitung dengan melihat potensi sumber daya perikanan darat dan laut yang dimiliki, masih sangat memungkinkan untuk diberdayakan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pemberian keterampilan nelayan dan penggunaan alat tangkap yang tepat guna. Penggalan potensi sumber daya perikanan di Kota Bitung memerlukan sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat KP, perbaikan aspek penunjang produksi perikanan, serta penyediaan fasilitas (seperti TPI dan lainnya).

Tabel 5. Jumlah Produksi dan Nilai Produksi di Kota Bitung Tahun 2009

| Produk | Produksi (Ton) | Nilai Produksi (000 Rp.) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Ikan | 44.400,0 | 929.123.250 |
| Binatang berkulit keras | 285,1 | 1.711.500 |
| Binatang berkulit lunak | 366,2 | 2.119.480 |
| Binatang air lainnya | 1,9 | 7.600 |
| Jumlah | 145.053,2 | 932.961.830 |

Sumber: Pemerintah Kota Bitung (2010)

Tabel 6. Jumlah Kapal Ikan di Kota Bitung Tahun 2009

| Jenis Kapal | Jumlah |
|---------------------|---------------|
| Perahu tanpa motor | 679 |
| Perahu motor tempel | 522 |
| Kapal motor | 782 |
| Jumlah | 1.983 |

Sumber: Pemerintah Kota Bitung (2010)



Pemasaran Hasil Tangkapan dan Potensi Pasar

Hasil tangkapan perikanan yang didaratkan di PPS Bitung, pemasarannya dilakukan dalam bentuk produk ikan segar dan beku (tujuan distribusi: lokal, antar kota, dan ekspor). Volume ekspor hasil perikanan pada tahun 2010, diketahui sebesar 25.746,96 ton dengan total nilai sebesar 87.398.365,84 US\$ (Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, 2011). Pemasaran hasil perikanan sebagian besar dialokasikan ke industri pengolahan dan sisanya untuk konsumsi (pedagang yang paling berperan adalah pengecer). Sistem transportasi ikan yang dipasarkan ke luar kota diangkut menggunakan kapal laut dan yang dipasarkan untuk konsumen dalam kota, menggunakan mobil dengan sistem pendingin. Sistem pembayaran hasil penjualan perikanan dilakukan secara tunai.

Hasil tangkapan ikan segar (68.25%) dipasarkan di dalam wilayah Kota Bitung dan sisanya diekspor, sedangkan 69.26% bahan baku olahan dipasarkan ke luar Kota Bitung. Tujuan pemasaran ikan segar dalam provinsi adalah: Kota Bitung (14.6%), Kota Manado (12.10%), Kota Minut (10%), dan Kota Tomohon (8%). Hasil perikanan dalam bentuk segar yang diekspor ke negara Jepang, Amerika, dan Uni Eropa, totalnya sebesar 25%. Tujuan pemasaran bahan baku olahan dalam provinsi yaitu: Kota Bitung (20.5%) dan Kota Manado (3.24%), sedangkan di luar provinsi dipasarkan ke Kota Jakarta (3.5%) dan Kota Surabaya (3.5%).

Promosi yang pelaksanaannya melibatkan peran serta dan kerjasama berbagai instansi, memberikan

pengaruh terhadap potensi pasar dan pengelolaan sumber daya perikanan. Keberhasilan kegiatan Minapolitan di Kota Bitung, ditentukan oleh adanya niat baik dan kemampuan berkoordinasi para pelakunya dalam setiap tahap kegiatan pemasaran. Niat serta koordinasi yang baik tersebut, dapat mewujudkan keterpaduan usaha perikanan dari hulu ke hilir. Program Minapolitan diharapkan bisa mempercepat terwujudnya keterpaduan pemasaran usaha perikanan Kota Bitung, dengan produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing.

PPS Bitung dalam Sudut Pandang Minapolitan

Minapolitan dapat dikatakan sebagai kebijakan terobosan untuk memacu pertumbuhan pada sektor KP (Zulham dan Purnomo, 2010). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2011), program Minapolitan bertujuan: (a) meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk KP; (b) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan yang adil dan merata, (c) mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Bitung dipilih sebagai lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, karena secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan, serta jasa. Ikan yang didaratkan di PPS Bitung berasal dari kapal nelayan lokal, *purse seine*, *hand line*, *long line*, serta kapal pengumpul dan pengangkut. Hasil ikan yang didaratkan, pemasarannya ditujukan ke wilayah Kota Bitung dan sekitarnya. Komoditas ikan yang diekspor diwajibkan untuk



memenuhi syarat mutu Balai Pengujian dan Sertifikasi Hasil Perikanan (BPSHP). Kegiatan operasional PPS

Bitung tahun 2009 – 2010, dapat dilihat pada Tabel 7.

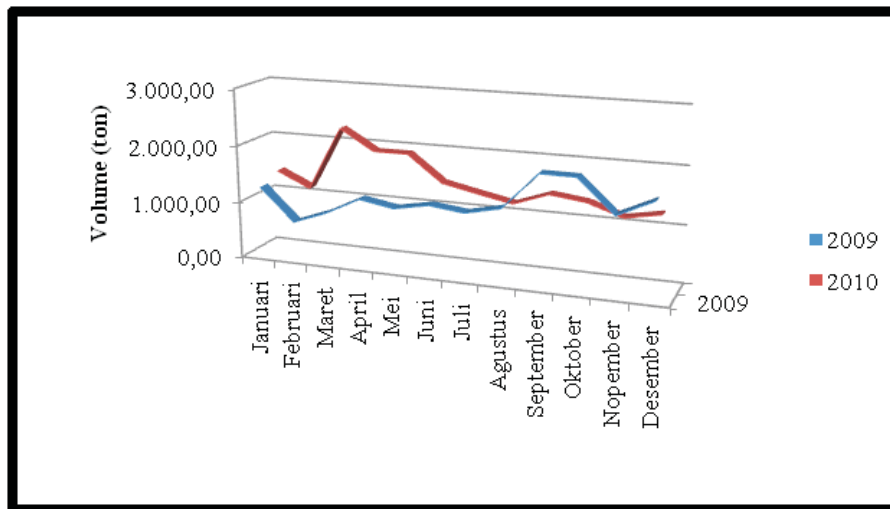
Tabel 7. Kegiatan Operasional PPS Bitung (2009 – 2010)

| Kegiatan | 2009 | 2010 | Naik/Turun (%) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Produksi ikan (ton) | 15.599 | 17.704 | 13.50 |
| Nilai produksi (Rp) | 185.372.734.669 | 200.913.170.538 | 8.38 |
| Frekuensi kunjungan kapal (kali) | 21.432 | 18.262 | -14.79 |
| Penerimaan bukan pajak (PNBP) | 221.945.970 | 279.005.389 | 25.709 |
| Penyaluran perbekalan: | | | |
| - Es (balok) | 110.374 | 400.000 | 362.304 |
| - Air (liter) | 3.452.000 | 6.085.000 | 76.27 |
| - Garam (kg) | 7.6555 | 98.250 | 1.183 |
| - Solar (liter) | 10.312.655 | 15.309.178 | 48.45 |
| - Minyak tanah (liter) | 198.652 | 987.000 | 391.8 |
| - Oli (liter) | 23.150 | 117.550 | 407.78 |
| - Bensin (liter) | 58.000 | 44.150 | -23.88 |

Sumber: Sitanggang *et al.* (2011)

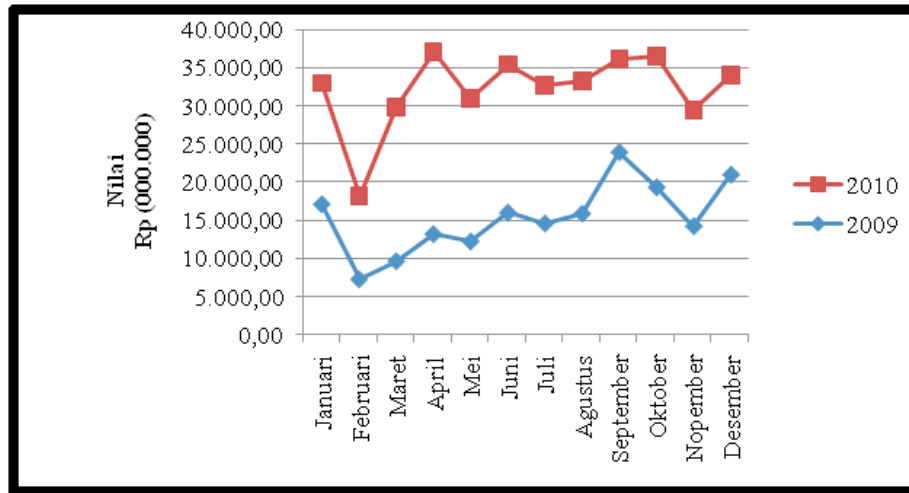
Tabel 7, menunjukkan bahwa kenaikan produksi ikan di PPS Bitung diakibatkan: (a) jumlah hasil tangkapan per trip; (b) frekuensi kapal bongkar untuk jenis kapal motor di atas 30 GT;

(c) jenis tangkapan ikan; (d) keberadaan sumber daya ikan yang masih baik. Volume dan nilai produksi ikan yang didaratkan di PPS Bitung, dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



Sumber: Sitanggang *et al.* (2011)

Gambar 1.
Volume Produksi Ikan



Sumber: Sitanggang *et al.* (2011)

Gambar 2.
Nilai Produksi Ikan

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa volume produksi ikan pada tahun 2009 (15.598,80 ton) mengalami kenaikan pada tahun 2010, menjadi 17.703,89 ton (meningkat 13.50%). Gambar 2, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 nilai produksi ikan mengalami peningkatan sebesar 8.38% (Rp. 200.913.170.538,-), dibandingkan tahun 2009 (Rp. 185.372.734.669,-). Keberadaan PPS Bitung dengan adanya kebijakan Minapolitan, telah memberikan pengaruh kepada masyarakat KP dalam mendapatkan kemudahan untuk melakukan aktivitas produksi, pemasaran, dan keringanan tarif perbaikan mesin/badan kapal. Kemudahan tersebut menjadi input keuntungan ekonomis bagi masyarakat KP di kawasan PPS Bitung dan Kota Bitung secara umum.

Kesiapan PPS Bitung menjadi Kawasan Inti Minapolitan

PPS Bitung dalam rangka mengelola fasilitas yang dimiliki, tidak

terlepas dengan adanya permasalahan serta hambatan. Kesiapan infrastruktur PPS Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan secara umum sudah mencukupi, akan tetapi masih perlu dibangun dermaga bongkar baru. Pembangunan ini akan melengkapi fasilitas kesyahbandaran yang memerlukan tempat bagi kapal pandu untuk pengawasan, serta menjaga keselamatan nelayan kapal kecil akibat gerak kapal besar yang memasuki pelabuhan. Fasilitas tersebut perlu dibangun secara bertahap oleh pengelola PPS Bitung, agar dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola pelabuhan untuk menjaga kapal tidak terhambat pada saat bongkar muat dan kapal berukuran > 1000 GT dapat ditampung, adalah mengeruk perairan dermaga yang menjadi lalu lintas kapal. Fasilitas listrik pada kawasan PPS Bitung membutuhkan penambahan daya, agar bisa memenuhi kebutuhan aktivitas



pelabuhan. Limbah yang dihasilkan pada saat bongkar ikan, dapat diatasi dengan menambah unit pengolah limbah baru dan memaksimalkan operasional unit pengolah limbah yang sudah ada. Debit air tawar yang terbatas untuk disalurkan, menyebabkan pasokannya masih mendatangkan dari luar kawasan pelabuhan dengan biaya tinggi (dikarenakan kurangnya kapasitas penampungan air bersih).

Kesiapan masyarakat dan bisnis pada wilayah PPS Bitung menunjukkan peran penduduk lokal dan pendatang sangatlah besar, baik sebagai nelayan; pemasar ikan; penyedia jasa pelayanan administrasi keberangkatan; penyedia jasa perbaikan kapal; dan penyedia jasa permodalan. Usaha yang berkembang di kawasan PPS Bitung perlu lebih diberdayakan, karena potensi yang dimiliki masih sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan usaha ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Aspek sumber daya dan tata ruang di PPS Bitung secara umum telah mendukung pengembangan wilayah Minapolitan. Pengembangan pengaturan aktivitas pemanfaatan sumber daya perlu lebih diefektifkan lagi, untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian habitat lingkungan. Peningkatan akan kebutuhan pengalokasian anggaran perlu diperhatikan serta dicermati, agar daya dukung operasional pemanfaatan tata ruang yang ada di PPS Bitung lebih terawat dan terpelihara dengan baik.

Penguatan kelembagaan serta peningkatan kinerja dan fungsinya, merupakan salah satu penggerak keberhasilan program kebijakan Minapolitan. Kelembagaan yang ada sekarang akan lebih optimal apabila didukung dengan pembentukan

asosiasi kelompok pedagang, kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan, serta kelembagaan untuk mengantisipasi kenaikan hasil tangkapan nelayan. Dukungan alokasi anggaran DPRD setempat, sangat dibutuhkan untuk dana monitoring dan evaluasi terhadap setiap kelembagaan yang ada. Menurut Halim (2007), anggaran merupakan *managerial plan for action* dalam memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga pelaksanaan tugas pokok kelembagaan yang ada sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Peran PPS Bitung yang cukup tinggi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, menyebabkan keberadaan teknologi harus terus dikembangkan (khususnya penangkapan ikan, transportasi, serta penanganan ikan). Pengelolaan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki PPS Bitung dapat menjadi optimal, jika dilakukan diseminasi teknologi yang tepat guna. Diseminasi teknologi memerlukan adanya pendampingan yang konsisten, agar introduksinya dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak yang berkepentingan. Strategi kebijakan serta tata kelola pemerintahan merupakan hasil interaksi faktor pendorong (kekuatan dan peluang) dan faktor penghambat (kelemahan dan kendala), yang secara umum berpengaruh terhadap pengelolaan PPS Bitung. Menurut Rakhmat (2009), masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kebijakan yang dibuat harus dapat menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, dimana



pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik. Menurut Agustino (2006), kekuasaan dan kewenangan akan menjadi pengaruh yang sangat efektif dalam setiap tindakan serta keputusan yang diambil. Tingkat komitmen pelaksana kebijakan Minapolitan PPS Bitung untuk merealisasikan tujuan yang sudah digariskan, merupakan variabel krusial. Penetapan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan secara operasional sudah dirasakan manfaatnya oleh para pengguna jasa (terutama masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan). Aspek yang terkait dengan kelembagaan, masyarakat dan bisnis; sumber daya dan tata ruang; kebijakan dan tata kelola pemerintahan; infrastruktur; serta teknologi yang berkembang di PPS Bitung, telah siap mendukung implementasi tujuan ditetapkannya Kota Bitung sebagai wilayah Minapolitan dalam pengembangan industrialisasi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan penetapan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan, telah memberikan implikasi yang positif bagi pembangunan wilayah dan perekonomian Kota Bitung. Pilar pembangunan yang menjadi indikator strategi kekuatan pengembangan PPS Bitung, secara umum telah mendukung kebijakan Minapolitan Kota Bitung. Dampak adanya kebijakan Minapolitan Kota Bitung, memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran; kependudukan dan tenaga kerja; ketersediaan sumber daya; pemasaran hasil tangkapan dan potensi pasar. Pengaruh ini secara keseluruhan

memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal, serta terbangunnya usaha industri pengolahan berbasis rumah tangga pada kawasan PPS Bitung. Kesiapan PPS Bitung untuk menjadi kawasan inti Minapolitan tidak terlepas dengan adanya manfaat lebih setiap potensi sumber dayanya. Mengacu kepada hal tersebut, kebijakan pemerintah (KKP) sudah tepat dalam menetapkan PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan.

Saran

Pembangunan potensi Kota Bitung untuk menjadi wilayah Minapolitan, implementasinya memerlukan tata kelola operasional yang baik dan bersih. Hal ini dilakukan agar PPS Bitung menjadi titik sentral pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis industri perikanan. Aspek kebijakan dan tata kelola manajemen PPS Bitung membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, serta mampu bersaing di era globalisasi. Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya untuk menciptakan iklim yang sehat bagi kegiatan ekonomi masyarakat, bisa memicu tumbuhnya investasi usaha di Kota Bitung (khususnya PPS Bitung). Keikutsertaan dan kerjasama berbagai instansi, merupakan bentuk kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemasaran perikanan. Penyusunan program pengelolaan usaha yang komprehensif berbasis industri di PPS Bitung, dapat mengoptimalkan pemanfaatan sub sektor perikanan Kota Bitung pada tataran ekonomi nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Harian Waspada Medan. (2012). Minapolitan Mendukung Industrialisasi Perikanan. http://waspada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16432:minapolitan-mendukung-. Tanggal akses: 24 Juli 2012
- Anonimous^b. (2010). Revolusi Biru, Strategi Indonesia Bersaing di Kelautan dan Perikanan Dunia. <http://www.goblue.or.id/revolusi-biru-strategi-indonesia-bersaing-di-kelautan-dan-perikanan-dunia>. Tanggal akses: 10 Agustus 2012
- Badan Pusat Statistik Kota Bitung. (2010). Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Bitung (Angka Sementara). Kota Bitung
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik. (2010). Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung Tahun 2009. Kota Bitung
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2011). Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 2010. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kota Bitung
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. (2011). Rencana Tindak Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap. Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara). Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Fermana, S. (2009). *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta
- Halim, A. dan T.W. Damayanti. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Islamy, M.I. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta---
- Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 2010. 2011. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kota Bitung---
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Mustafa, A., I.N. Radiarta, Rachmansyah. (2011). *Profil dan Kesesuaian Lahan Akuakultur Mendukung Minapolitan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan – Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. Swakarya. Jakarta
- Pemerintah Kota Bitung. (2010). *Sekilas Kota Bitung*. <http://www.bitungkota.go.id/index.php>. Tanggal akses: 9 Agustus 2012
- Rakhmat. (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta
- Sari, F.N.I, H. Ibad, dan A. Muqorrobin. (2011). *Adopsi*



- Konsep Minapolitan dalam Konservasi Sumber Daya Rajungan (Portunus Pelagicus).* Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sitanggang, M.S., L. Sormin, M. Sendouw, J. Kaluntas, S. Arbiana, Sutrisno. (2011). *Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung 2010.* Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kota Bitung
- Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi).* Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suharto, E. (2008). Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:q6nC2bqgfiYJ:www.policy.hu/suharto/Naskah%2520PDF/LANPelayananPublik.pdf+konsep+Penerapan+Kebijakan+Pelayanan+Publik+Bagi+Masyarakat&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGESjQEjSpFEsiwCrJTSHTvoog](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:q6nC2bqgfiYJ:www.policy.hu/suharto/Naskah%2520PDF/LANPelayananPublik.pdf+konsep+Penerapan+Kebijakan+Pelayanan+Publik+Bagi+Masyarakat&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGESjQEjSpFEsiwCrJTSHTvoogNjehWB1CL_1dnBwg20Kd11jd6qNo8XCUokCjrQYV86SSgQ5kwHr6I1vw2wU_P3u6LfmmmvVHmnmzzDRrY4Fn11ukDf5Xx2jUTpdW_SlkX4DvQ7F&sig=AHIEtbTwLLMM2_Q6nZQ2MT8odq1I-ED4Q)
- NjehWB1CL_1dnBwg20Kd11jd6qNo8XCUokCjrQYV86SSgQ5kwHr6I1vw2wU_P3u6LfmmmvVHmnmzzDRrY4Fn11ukDf5Xx2jUTpdW_SlkX4DvQ7F&sig=AHIEtbTwLLMM2_Q6nZQ2MT8odq1I-ED4Q. Tanggal akses: 20 Juli 2012
- Zulham, A., A.H. Purnomo. (2010). *Minapolitan (dari Konsep Menuju Implementasi).* Balai Besar Riset Sosial Ekonomi dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Peraturan dan Keputusan

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010, tentang Minapolitan. Ditetapkan: 14 Mei 2010.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 32/MEN/2010, tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Ditetapkan: 14 Mei 2010

